

PLURALISME AGAMA DALAM PENDIDIKAN (Potret Toleransi Beda Agama di SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo)

Djunawir Syafar

IAIN Sultan Amai Gorontalo
e-mail:Djunawir_syafar@yahoo.com

Abstrak

Isu pluralisme agama menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan masyarakat Indonesiakhhususnya dalam konteks peningkatan bonus demografi. Lembaga pendidikan diharapkan menjadi sarana strategis untuk menginternalisasi nilai-nilai pluralisme agama dalam membangun toleransi. Penelitian ini, mendiskusikan bagaimana wujud pluralisme agama dalam pendidikandilihat dari sudut pandang toleransi beda agama yang ada di SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo. Sekolah ini menjadi menarik, karena menampilkan sisi yang berbeda dalam praktek pendidikannya. Di tengah-tengah masyarakat muslim sebagai mayoritas penduduknya, sekolah ini menunjukkan sisi toleransi yang kuat terhadap pemeluk agama berbeda yang mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Islam, Kristen dan Budha adalah representase dari pluralisme agama yang ada di SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo. Beberapa indikator dari wujud toleransi di sekolah ini; *Pertama*, pihak sekolahtelah memfasilitasi adanya masing-masing guru agama sebagai tenaga pengajar. *Kedua*, sekolah memberikan ruang dalam pelaksanaan ibadah keseharian bagi setiap pemeluk agama. *Ketiga*, sekolah jugamemfasilitasi dalam penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan. *Keempat*, belum pernah terjadi konflik yang membawa isu SARA. Faktor yang mendukungterwujudnya toleransi beda agama tersebut, antara lain: kebijakan sekolah yangberbasis pluralisme agama, komunikasi aktif pihak sekolah dengan orang tuamurid, kerja sama pihak sekolah dengan berbagai organisasi sosial keagamaan danbudaya masyarakat setempat yang menjadi titik temu antara perbedaan yang ada.

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai pembanding terhadap fenomena dan isu-isu intoleransi dalam dunia pendidikan dan ruang sosial saat ini.

Kata Kunci: Pluralisme Agama, Pendidikan, Toleransi

Abstract

In the face of demographic bonuses, the issue of religious pluralism becomes one of the challenges in the life of Indonesian society. Educational institutions are expected to be a strategic means to internalize the values of religious pluralism in building tolerance. This research, discuss how the form of religious pluralism in education is seen from the standpoint of tolerance of different religions in SD Negeri 46 Hulontaloangi Gorontalo City. This school became interesting, because it presents a different side in his educational practice. Amidst the Muslim community as the majority of its population, this school shows a side of tolerance to the followers of different religions who are educated at the school. Islam, Christianity and Buddhism are the representatives of religious pluralism in SD Negeri 46 Hulontaloangi Gorontalo City. Some indicators of this form of tolerance in schools; First, the school has facilitated religious teacher for every religious believers. Secondly, schools provide space for daily worship services for every adherent of religion. Third, schools also facilitate in organizing religious holidays. Fourth, there has never been a conflict that brought about the issue of SARA. Factors that support the realization of religious tolerance is different, namely: school policies based on religious pluralism, the school's active communication with parents, school cooperation with various religious and cultural societies of the local community that became the meeting point between the differences. This research, can serve as a benchmark against the phenomenon and issues of intolerance in the world of education and social space today.

Keywords: Religious Pluralism, Education, Tolerance

A. Pendahuluan

Hubungan antaragama di Indonesia menjadi salah satu isu sentral yang banyak diperbincangkan. Persoalan ini berhubungan erat dengan kondisi kemajemukan bangsa Indonesia yang hampir semua agama besar seperti Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu memiliki pemeluk di negara ini. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga terdiri dari beragam suku, etnis,

budaya dan bahasa, sehingga hal tersebut yang mempengaruhi konstruksi sosial dan pengamalan keagamaan bangsa ini cukup unik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.¹

Persoalan agama di Indonesia menunjukkan adanya sebuah relasi kuasa dari tiap-tiap otoritas agama. Bentuk kuasa ini, bisa melalui jalur ideologi, lembaga, sistem dan jaringan sosial. Itulah sebabnya, mengapa hubungan antar agama menjadi pusat wacana yang banyak digunakan oleh individu maupun kelompok dalam hal apa pun untuk menunjukkan adanya kuasa dan eksistensi dalam masyarakat. Hal ini, menjadi bagian penting dalam diskursus pluralisme agama termasuk dalam dunia pendidikan yang berusaha menemukan model kebijakan dan pendekatan yang tepat untuk menjembatani persoalan pluralisme tersebut.

Persoalan tentang pluralisme agama telah lahir cukup lama, namun ketegangannya masih dirasakan hingga saat ini. Seperti pembacaan Samuel P. Huntington dalam *Clash of Civilisation*, bahwa benturan dan ketegangan di masa mendatang adalah benturan agama dan etnis.² Konflik antar umat beragama untuk mempertahankan klaim dan kebenaran agama masing-masing dengan membawa misi dakwah dan pengaruh politik, yang pada akhirnya melahirkan klaim-klaim kebenaran dan justifikasi terhadap agama yang lain. Ketegangan yang bernuansa perbedaan keyakinan tersebut mencakup sampai pada sektor pendidikan, terutama di sekolah-sekolah umum yang berada di bawah naungan pemerintah. Ketegangan yang dimaksud, bukan hanya persoalan konflik yang berujung pada tindak kekerasan (fisik), namun pemberian ruang dan hak belajar agama yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tentu menjadi persoalan serius yang sampai saat ini belum terealisasi dengan baik. Sehubungan dengan ini, masalah penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah umum di bawah naungan pemerintah misalnya belum secara menyeluruh terselenggaranya kebijakan tentang hak

¹ Irfan Riyadi, dan Basuki, *Membangun Inklusivisme Paham Keagamaan*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009, hlm. 1.

² Samoel P. Huntington, *Clash of Civilisation and The Remakingof Word Order* London: Simon and Schuster Ltd, 1996, hlm. 21.

peserta didik untuk memperoleh pelajaran agama dan aktualisasi keagamaan dalam ruang sekolah sesuai dengan keyakinan masing-masing, belum difasilitasinya tenaga pengajar agama sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kurikulum dan materi pelajaran agama yang dibutuhkan, serta ruang aktualisasi keagamaan lainnya yang menopang terselenggaranya pendidikan agama untuk mewujudkan toleransi antar umat bergama.

Dalam konteks Negara Indonesia, persoalan pluralisme agama dalam ruang publik sebenarnya telah menemukan konsensus atau titik temu. Dimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan oleh pendiri bangsa (*the founding fathers*) sebagai landasan untuk menjembatani berbagai dimensi perbedaan yang ada. Sebagaimana sila pertama Pancasila dan bab XI UUD 1945 tentang agama, memuat tiga hal penting yakni: *Pertama*, negara menjamin kemerdekaan bagi warga negara untuk memeluk agama. *Kedua*, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk beribadah. *Ketiga*, negara mengakui agama sebagai bagian hak asasi bagi warga negaranya.³ Maka seharusnya posisi agama dalam ruang pendidikan mencerminkan nilai-nilai keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut. Serta, menjadi jalur strategis untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian antar umat beragama. Secara konstitusi, posisi pendidikan agama menurut undang-undang Sisdiknas pasal 30, yaitu: “pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama”.⁴ Pada kenyataannya, harapan akan terpenuhinya hak peserta didik tersebut, sampai saat ini masih menjadi wacana. Hampir sebagian besar lembaga pendidikan umum khususnya yang berada di bawah naungan pemerintah yang dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, belum seluruhnya memberikan ruang bagi setiap pemeluk agama yang berbeda, bahkan kebijakan ini baru

³ Saafroedin, Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 149.

⁴ *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, 2003, hlm. 24.

sebagian kecil yang merealisasikannya dan kebanyakan baru dimulai dari sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan. Hal tersebut menjadi kendala dalam pengaplikasian pendidikan agama sebagai basis perdamaian dan toleransi antar umat bergama.

Salah satu tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 yakni, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁵Usia Sekolah Dasar diyakini sebagai awal pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai dasar keagamaan, sosial, budaya, kemanusiaan dan lingkungannya. Jika usia Sekolah Dasar tidak dijumpai dengan pandangan keagamaan yang humanis akan berpengaruh pada pembentukan karakter dan konstruksi sosial kedepannya.

SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo merupakan lokus dari penelitian ini. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga pendidikan umum di bawah naungan pemerintah yang telah menyelenggarakan sistem pendidikan yang berbasis pengelolaan pluralisme agama di sekolah. Dengan sistem pendidikan yang memberikan ruang dan hak belajar agama sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Hal tersebut dapat diukur melalui beberapa indikator pelaksanaan kelembagaan seperti, adanya guru agama Islam, Kristen dan Budha sebagai tenaga pengajar pendidikan agama, pengadaan buku dan kurikulum pelajaran agama, hak-hak untuk mengaktualisasikan ibadah, serta aktualisasi keagamaan lainnya seperti perayaan hari-hari besar keagamaan serta hak dan kewajiban lainnya secara adil dan merata.⁶Sistem pendidikan ini, merupakan respons sekolah terhadap keragaman keyakinan peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah tersebut yang tidak hanya terdiri dari satu agama saja, namun terdiri atas tiga agama besar yakni Islam, Kristen, dan Budha.

⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

⁶ Dokumen Sekolah, Program Kerja Sekolah SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo, diambil pada tanggal 28 Agustus 2017, hlm. 15.

SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo telah mengimplementasikan manajemen pendidikan berbasis pluralisme agama dan nilai-nilai perdamaian, yang dimulai sejak tahun 1996.⁷Oleh karena itu, kiprah, peranan dan kebijakan lembaga ini menarik untuk ditelusuri dan dikaji, terutama sebagai bentuk respons terhadap kondisi masyarakat dan bangsa kita saat ini yang sedang mengalami konflik dan ketegangan sosial yang mengarah pada intoleransi agama. SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo didirikan pada tahun 1947. Sekolah ini tepat berada di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulontalo Kota Gorontalo.⁸Secara geografis, letaknya berada di jantung Kota Gorontalo. Jaraknya tidak jauh dari pusat pemerintahan, seperti Kantor Walikota dan beberapa pusat pemerintahan lainnya. Meskipun, muslim adalah mayoritas, letak sekolah ini berada dipemukiman warga yang cukup *heterogen* dan tidak jauh dari beberapa tempat ibadah, seperti Masjid, Klenteng dan Gereja. Hal tersebut yang mempengaruhi konstruksi sosial di sekolah ini, karena terjadinya pertemuan entitas agama berbeda yang memilih mengenyam pendidikan di sekolah ini. Faktor demikian, yang menuntut sekolah bagaimana mampu mengelola dan memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, baik pendidikan umum maupun agama. Jika dilihat dari jumlah keseluruhan peserta didiknya berdasarkan *representase* agama, Islam berjumlah 331 orang, Kristen 67 orang dan Budha sebanyak 42 orang.⁹Menariknya, jumlah tersebut bukan menjadi faktor yang menciptakan jarak (*gap*) antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Justru, kelompok mayoritas menjadi pengayom dan mitra yang baik. Mengapa demikian, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi.

B. Faktor yang Mempengaruhi Terwujudnya Toleransi Beda Agama

Pendidikan berfungsi untuk menguji dan mengintegrasikan semua nilai dalam kehidupan manusia serta menanamkannya ke

⁷ Data Resmi Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, diambil pada tanggal 30 Agustus 2017.

⁸ Dokumen Sekolah, Profil Sekolah SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo, diambil pada tanggal 28 Agustus 2017, hlm. 15.

⁹ Dokumen Sekolah, Data Jumlah Peserta Didik SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo Menurut Agama Tahun Ajaran 2017, diambil pada tanggal 22 Agustus 2017, hlm. 2.

dalam kepribadian peserta didik.¹⁰Dengan begitu, peserta didik akan lebih terbuka dalam memahami realitas kehidupannya. Definisi di atas, menunjukkan adanya posisi pendidikan umum yang merupakan akses publik, siapa saja memperoleh kesempatan dan hak yang sama untuk bisa belajar dan memperoleh hak-hak lainnya, jika telah memenuhi syarat baik secara administratif maupun non administratif, namun tidak berdasarkan suku, agama, ras, golongan, apalagi status sosial.

Semenjak sekolah ini berdiri, sebenarnya telah bersentuhan dengan ragam peserta didik. Meskipun, pada awalnya peserta didik non muslim masih dengan jumlah yang sangat sedikit, namun seiring dengan berjalan waktu terus semakin bertambah. Pada awalnya, pihak sekolah sempat mengalami kesulitan untuk mencari guru agama Kristen dan Budha sebagai pengajar, apalagi terkait Gorontalo sebagai kawasan muslim. Hal ini yang membuat pelajaran agama sempat mengalami kendala, karena tidak ada guru yang mengajar pada peserta didik Kristen dan juga Budha. Akhirnya, pihak sekolah membuat alternatif, untuk pelajaran agama dibuat semacam pelajaran khusus yang nantinya orang tua murid bisa mencari sendiri guru agama yang mengajar pada anak-anaknya baik di rumah atau di tempat lainnya. Pada tahun 1996, berdasarkan permintaan pihak sekolah dan kerjasama dengan pemerintah, akhirnya sekolah ini telah memiliki guru pendidikan agama Kristen yang berstatus PNS yang berasal dari pemerintahan Kota Bitung, Sulawesi Utara. Bertepatan dengan guru agama Kristen tersebut melakukan mutasi kerja, mengetahui sekolah ini membutuhkan guru agama Kristen, maka ditempatkan di SD Negeri 46 Hulontalo kota Gorontalo hingga saat ini. Secara bertahap, kebutuhan akan pendidikan agama Kristen terpenuhi.¹¹Demikian halnya dengan peserta didik yang beragama Budha, melalui kerjasama pihak sekolah dengan orang tua murid

¹⁰ Murtiningsih, Siti, *Pendidikan Alat Perlawanan*, Yogyakarta: Resist Book, 2004, hlm. 60.

¹¹ Hasil wawancara dengan ibu Martje Tapada, guru pendidikan agama Kristen SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo, di ruang guru agama Kristen pada tanggal 23 Agustus 2017, jam 11.00 WITA.

dan organisasi sosial keagamaan, pada tahun 2007 mendatangkan seorang guru agama Budha yang berasal dari Malang Jawa Tengah, melalui yayasan Budha Dharma Vihara Kota Gorontalo.¹²

Gambaran di atas, menunjukkan adanya kerjasama *stakeholder* di lembaga ini yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian, agama tidak lagi diposisikan sebagai doktrin, tapi sebagai nilai. Nilai yang dimaksud adalah pandangan antara agama-agama yang tidak lagi terjebak pada *justifikasi* tetapi lebih pada komunikasi. Dinamika yang dirasakan oleh lembaga ini sebelum adanya guru agama non muslim, ketika waktu pelajaran agama peserta didik yang non muslim biasanya hanya diarahkan pada kegiatan seperti membaca atau diberikan tugas-tugas tambahan lainnya. Hal tersebut, dirasakan oleh pihak sekolah sendiri termasuk orang tua murid bukanlah sebuah solusi, karena seperti terjadi kesenjangan antara satu agama dengan agama yang lainnya. *Problem* tersebut dapat teratasi, ketika sekolah sudah memfasilitasi guru agama untuk masing-masing agama, sehingga kebutuhan akan terpenuhinya pelajaran agama bagi semua peserta didik sudah terpenuhi.

Faktor yang mempengaruhi terwujudnya toleransi beda agama di sekolah ini, antara lain:

1. Kebijakan Sekolah

Kebijakan adalah bentuk konkret dari politik. Asumsi politik tersebut dalam pendidikan terkait dengan apa yang menjadi persoalan pendidikan itu sendiri. Di sekolah ini, spirit utama yang dijadikan pandangan dan dasar kebijakannya adalah nilai dasar kebangsaan kita, yakni “Pancasila dan UUD 1945”. Jika muncul pertanyaan dalam masyarakat, mengapa harus Pancasila dan UUD 1945, jawabannya bukan hanya sekedar konsensus (kesepakatan), namun sebelum bangsa Indonesia berdiri kokoh, para pendiri bangsa kita (*the Founding Fathers*) telah memikirkan hal demikian. Bahwa untuk mendirikan suatu bangsa yang beragama, maka

¹² Hasil wawancara dengan bapak Waluyo Dwi Asmoro, guru pendidikan agama Budha SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo, di ruang ibadah agama Budha, pada tanggal 21 Agustus 2017, jam 14.00 WITA.

dibutuhkan sebuah pandangan yang nantinya akan menjadi pandangan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana Soekarno menegaskan dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, bahwa isi dari Pancasila tersebut adalah *philosophiche grondslagen* yakni nilai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka.¹³ Nilai filosofis kebangsaan tersebut, secara konkret telah dijabarkan oleh pemerintah ke dalam berbagai kebijakan dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang secara *real* mengatur apa yang menjadi isi terkait dengan pengelolaan keragaman dalam pendidikan.

2. Kerjasama dengan Orang Tua

Wujud toleransi di sekolah ini, tidak terjadi begitu saja melainkan ada upaya kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Posisi orang tua dalam hal ini adalah mitra dalam memberikan peran aktif dan juga solusi. Misalnya, terkait dengan kebutuhan guru agama, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ketika pihak sekolah kesulitan mencari guru agama Budha, maka melalui partisipasi orang tua murid yang bekerja sama langsung dengan pihak Yayasan Budha Vihara kota Gorontalo, sehingga guru agama Budha didatangkan oleh pihak yayasan sebagai tenaga pengajar di sekolah ini.¹⁴

Potret lain yang melibatkan kerjasama orang tua murid dengan pihak sekolah misalnya, dalam perayaan hari-hari besar keagamaan. Ketika muslim melaksanakan salah satu kegiatan keagamaan, contohnya dalam pelaksanaan buka puasa bersama, maka guru dan peserta didik non muslim biasanya turut hadir dan berpartisipasi, misalnya berpartisipasi membawakan makanan untuk buka puasa bersama. Demikian halnya dengan agama Kristen, seperti pada peringatan natal, orang tua murid yang beragama Kristen mengundang guru dan orang tua murid lainnya yang

¹³ Soekarno, *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila Oleh Presiden Soekarno*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017, hlm. 2.

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Abdurrahman Dipu, Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 46 Hulontalangi Kota Gorontalo, di ruang guru pada tanggal 21 Agustus 2017, jam 09.30 WITA.

beragama muslim dan Budha untuk berkunjung atau bersilaturahmi. Begitupun dengan agama Budha, ketika ada perayaan hari-hari besar keagamaan, agama yang lainnya turut ikut berpartisipasi. Hal tersebut yang membangun relasi dan toleransi antar umat beragama di sekolah ini sehingga dapat terwujud dengan harmonis.¹⁵

3. Kerjasama Organisasi Keagamaan

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), adalah salah satu wadah atau organisasi lintas keagamaan dengan tujuan membangun relasi antar umat beragama yang berada di kota Gorontalo.

Bentuk kerjasama pihak sekolah dengan lembaga ini, bahwa guru agama Budha di sekolah ini berasal dari pengurus yayasan Budha Dharma Vihara kota Gorontalo yang juga ikut terlibat aktif sebagai pengurus dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tujuan yang dibangun sekolah dengan organisasi ini tidak hanya sebatas kerjasama yang sifatnya formal. Tetapi, menunjukkan adanya tiga hal: *Pertama*, sekolah menjadi basis perdamaian antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. *Kedua*, terjadi saling belajar atau bertukar informasi terkait pandangan keagamaan. *Ketiga*, membangun dialog untuk membongkar batas-batas kecurigaan yang selama ini diyakini oleh setiap agama-agama. Kata kunci dari kerjasama ini adalah “dialog” atau terjadi komunikasi yang dapat membangun nilai-nilai humanisme.

4. Akar Budaya Masyarakat

Dalam masyarakat Gorontalo, memiliki filosofi “Adat Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah”. Akulturasi antara nilai keagamaan dan budaya masyarakat menjadi penguat dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, representasi penduduk Kota Gorontalo berdasarkan agama, Islam sebesar 95,63%, Kristen

¹⁵ Hasil wawancara dengan ibu Sintje Akadji, Kepala Sekolah SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo, di ruang Kepala Sekolah pada tanggal 21 Agustus 2017, jam 11 WITA.

Protestan 2,47%, Katholik 1,32%, Hindu 0,12%, Budha 0,47% dan Konghucu 0,0%.¹⁶

Jika dilihat dari jumlah pemeluk berdasarkan agama, maka sebagian besar penduduk masyarakat Gorontalo adalah muslim. Tetapi, wajah keislaman di daerah ini tidak bisa dilepaskan dari kultur masyarakatnya, sebagaimana filosofi dari masyarakat di atas. Yang menarik, Islam yang berafiliasi dengan tradisi masyarakatnya menunjukkan wajah yang toleran. Mengapa demikian? Akulturasi nilai budaya masyarakat Gorontalo dan nilai keislaman justru mempengaruhi pola keagamaan di daerah ini menjadi lebih adaptif. Misalnya, ketika peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi atau peringatan hari besar keagamaan lainnya, masyarakat menyelenggarakan acara dengan balutan nilai-nilai Islam nilai kedaerahan. Hal demikian yang menjadi perekat kebersamaan yang tidak hanya antara sesama muslim, tetapi agama lainnya pun bisa beradaptasi, sehingga nilai yang dimunculkan adalah, bagaimana masyarakatnya sangat mengayomi, saling menghormati dan mensyukuri kehidupan sebagai rahmat dari Tuhan YME.

C. Bentuk Toleransi Beda Agama

Toleransi merupakan pandangan bahwa setiap agama mempunyai nilai keselamatan, kemanusiaan dan keadilan. Spirit toleransi beda agama ini lahir, karena adanya realitas yang majemuk. Kekeringan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, bisa memicu terjadinya ketegangan sosial yang berujung pada bentuk intoleransi hingga tindakan ekstrimisme.

Praktek toleransi yang dimunculkan oleh lembaga ini, lebih dekat dengan perspektif pluralisme agama yang digambarkan oleh Amin Abdullah. Menurutnya, pluralisme agama merupakan kenyataan historis yang tidak dapat disangkal oleh siapa pun. Bahwa semua agama itu berbeda, berbeda doktrinnya, institusinya, kelembagaannya, pemimpinnya, jenis umatnya, hari besar, ruang, tempat, dan waktu yang dianggap suci. Namun, dalam perbedaan

¹⁶ Data Resmi, Kanwil Kemenag Povinsi Gorontalo, dalam BPS Provinsi Gorontalo 2017, diambil pada tanggal 22 Agustus 2017, hlm. 2.

tersebut, terdapat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, keprihatinan pada lingkungan buruk, dan masalah lainnya.¹⁷

Potret toleransi beda agama di sekolah ini, antara lain:

1. Praktek Pengajaran

Dalam praktek pengajaran tiga agama besar yang ada di sekolah ini, yakni Islam, Kristen dan Budha, ada duapendekatan yang digunakan, yakni pengajaran umum dan pengajaran khusus. Dalam pengajaran secara umum, biasanya diterapkan pada mata pelajaran umum, seperti Matematika, bahasa Indonesia dan pelajaran umum lainnya. Pada tahap ini, semua peserta didik belajar secara bersama-sama dalam satu kelas yang terdiri dari semua peserta dengan berbagai agama, sama seperti pada umumnya. Sedangkan pengajaran secara khusus, diterapkan untuk pelajaran berbasis agama, konsepnya tiga agama tersebut belajar di ruangan tersendiri dengan guru agama masing-masing.

Pertanyaannya, mengapa harus ada bentuk pemisahana?. konseppemisahan khusus pada pelajaran agama, didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, setiap mata pelajaran agama yang akan diajarkan mempunyai indikator yang berbeda. *Kedua*, kurikulum masing-masing agama juga berbeda. *Ketiga*, muatan teologis yang diajarkan berbeda. *Keempat*, kompetensi yang ingin dicapai pada masing-masing pelajaran agama juga memiliki perbedaan. Bentuk pemisahan ini, bukanlah pemisahan dalam konteks dipisahkan, tetapi pelajaran agama pada usia anak Sekolah Dasar belum dapat dimaknai secara filosofis dan komprehensif. Lantas, jika bentuk pengajarannya terpisah, bagaimana dengan pengajaran nilai-nilai toleransi dan pluralisme agamanya.

Konsep pemisahan dalam pembelajaran tersebut tidak menyentuh substansi makna pluralisme, meskipun diajarkan secara terpisah, namun internalisasi materi yang diajarkan pada masing-masing agama memiliki muatan tentang pemahaman toleransi antara umat beragama. Misalnya, dalam pelajaran agama Islam

¹⁷ Abdullah, Amin, *Studi Agama: Normativitas dan Historitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 3, 2002, hlm. 76.

memiliki muatan materi tentang bagaimana Islam mengajarkan sikap saling menyayangi sesama manusia, hidup rukun dan toleran terhadap orang lain.¹⁸ Dalam pelajaran agama Kristen misalnya, juga memuat ajaran tentang bagaimana melayani dan menyayangi sesama manusia.¹⁹ (Dokumen, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran agama Kristen kelas VI 2017: 1).

Demikian halnya dengan agama Budha yang mengajarkan tentang nilai-nilai cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*), simpati (*mudita*) dan batin seimbang (*upekkha*).²⁰

2. Pelaksanaan Ibadah

Dalam praktek ibadah, sisi menarik yang menunjukkan adanya toleransi dalam lingkungan sekolah ini, di mana sekolah memberikan ruang yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk dapat melaksanakan ibadah. Sehingga, tidak terbangun adanya jarak (*gap*) yang memunculkan prasangka (*prejudice*) antara satu sama lain, karena semuanya sudah difasilitasi, memiliki hak dan ruang yang sama sesuai dengan kebutuhan.

Misalnya, ketika pada pukul 12.00 siang, sekolah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan ibadah. Muslim melaksanakan sholat dzuhur berjamaah. Di ruangan yang berbeda, agama Kristen dan Budha juga melaksanakan Ibadah atau pembinaan kerohanian masing-masing.²¹

Hal ini dilaksanakan secara konsisten, sehingga pembiasaan semacam ini, mengajarkan pada peserta didik dan seluruh warga sekolah tentang adanya sikap toleransi terhadap pemeluk agama yang berbeda. Karena, pada dasarnya setiap agama memiliki

¹⁸ Dokumen Sekolah, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran agama Islam kelas VI SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo, diambil pada tanggal 22 Agustus 2017, hlm. 20.

¹⁹ Dokumen Sekolah, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran agama Kristen kelas VI SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo, diambil pada tanggal 22 Agustus 2017, hlm. 1.

²⁰ Dokumen Sekolah, Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran agama Budha kelas I SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo, diambil pada tanggal 22 Agustus 2017, hlm. 94.

²¹ Hasil wawancara dengan ibu Trisnayani, guru pendidikan agama Islam SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo, di ruang guru pada tanggal 22 Agustus 2017, jam 15.00. WITA.

ritual agama yang berbeda, doktrin yang berbeda dan ajaran yang berbeda. Namun, perbedaan tersebut akan ketemu pada nilai-nilai kemanusiaannya dan keadilan.

Nilai lebih yang muncul dari lingkungan semacam ini, peserta didik sejak dini sudah terbiasa dengan realitas yang berbeda, sehingga mereka tidak kaget ketika bertemu dengan adanya realitas sosial yang berbeda dalam masyarakat, karena dimulai dari lingkungan sekolah dan juga keluarga sudah mengajarkan bagaimana hidup toleransi di tengah-tengah perbedaan. Memandang orang lain yang berbeda keyakinannya bukanlah suatu hal yang keliru, karena pada dasarnya perbedaan adalah suatu keniscayaan.

3. Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan

Pada peringatan hari besar keagamaan, sekolah tidak hanya melibatkan satu agama saja, tetapisemua peserta didiknya bisa ikut berpartisipasi. Misalnya, dalam perayaan pawai Muharam bagi umat Islam, peserta didik yang non muslim bisa ikut berpartisipasi. Disinilah peran budaya menjadi titik temu, agar tidak terjadi diskriminasi simbolik (pakaian), maka peserta didik non muslim biasanyadengan menggunakan pakaian adat daerah. Dan biasanya, hal tersebut adalah bagian dari tradisi masyarakat Gorontalo untuk mempertahankan akar budayanya, sehingga, hal demikian bukanlah sesuatu yang aneh atau dianggap keliru. Karena, setiap kegiatan apapun, masyarakatnya selalu mempertahankan tradisi dan nilai-nilai budayanya.

Demikian halnya dengan toleransi antarasasamguru, contoh kasus, dalam persiapan pawai keagamaan tersebut guru-guru yang non muslimsangat membantu satu sama lain. Begitupun orang tua murid, meskipun untuk perayaan keagamaan bagi umat Islam, orang tua murid non muslim, selalu memberikan partisipasi baik secara moril maupun materil, misalnya dengan membawa kue-kue tradisional untuk pawai, dan lain sebagainya. Toleransi bagi mereka, adalah suatu kebiasaan yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari (*habitus*).

Contoh kasus lainnyadalam lingkungan sekolah ini, Pada

peringatan Imlek, Natal dan Tahun Baru misalnya, selain dirayakan di rumah masing-masing atau di tempat ibadah, biasanya sekolah memberikan ruang untuk dirayakan di sekolah. Melalui perayaan hari besar agamatersebut, guru dan orang tua murid baik yang beragama Budha, Islam maupun Kristen bisa berkumpul satu sama lain, serta terbangun kebersamaan. Dan hal tersebut adalah bagian dari pendekatan dalam membangun harmonisasi antar umat beragama.

Potret di atas, menggambarkan bagaimana toleransi beda agama yang ada dalam lingkungan sekolah ini. Poin penting yang dapat diambil, antara lain: *Pertama*, agama hadir tidak dengan wajah yang mengerikan, namun menjadi nilai keselamatan dan sumber petunjuk dalam kehidupan setiap pemeluk agama. *Kedua*, sekolah menjadi basis perdamaian, sehingga terlihat bagaimana sekolah mampu mengelola dan menginternalisasi nilai-nilai ajaran agama dalam pemeluk agama yang berbeda. *Ketiga*, dalam konteks Negara Indonesia, kita membutuhkan sekolah yang menjadi penyeimbang di tengah-tengah pusaran isu-isu intoleransi.

D. Penutup

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks sekolah umum negeri, tidak ada tendensi yang membawa isu SARA, karena salah satu tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pancasila dan UUD 1945 merupakan nilai dasar kebangsaan yang dijadikan landasan dan filosofi dalam pembentukan undang-undang sistem pendidikan nasional Indonesia. Di SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo, beberapa faktor yang menopang terwujudnya toleransi beda agama antara lain: *Pertama*, adanya kebijakan pendidikan yang berbasis pluralisme dan toleransi beda agama. *Kedua*, kerjasama aktif antara pihak sekolah dengan orang tua murid. *Ketiga*, kerjasama pihak sekolah dengan organisasi sosial keagamaan. *Keempat*, nilai budaya masyarakat setempat yang mendukung terwujudnya harmonisasi antar umat beragama.

Beberapa potret toleransi beda agama yang ditunjukkan oleh sekolah ini antara lain, sekolah memfasilitasi adanya masing-masing guru agama sebagai tenaga pengajar, kurikulum dan materi pelajaran yang berbasis pluralisme agama, pemberian hak dan ruang yang sama dalam pelaksanaan ibadah keseharian, pemberian ruang dalam perayaan hari-hari besar keagamaan di sekolah pada tiap-tiap agama, dan seluruh warga sekolah menunjukkan adanya toleransi keseharian yang menjadi spirit di tengah-tengah perbedaan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Studi Agama: Normativitas dan Historitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 3, 2002.
- Bahar, Saafroedin, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Buku Panduan Pembelajaran Pendidikan Agama Budha dan Budi Pekerti*, Kelas I Semester II tahun ajaran 2017.
- Data Resmi Dinas Pendidikan Kota Gorontalo Tahun 2017.
- Data Kanwil Kemenag Povinsi Gorontalo, dalam BPS Provinsi Gorontalo 2017.
- Dokumen Sekolah, Data Jumlah Peserta Didik SD Negeri 46 Hulontalo Kota Gorontalo Menurut Agama Tahun Ajaran 2017/2018.

- Dokumen Sekolah, Profil Sekolah SD Negeri 46 Hulontalangi Kota Gorontalo 2017.
- Dokumen Sekolah, Program Kerja Sekolah SD Negeri 46 Hulontalangi Kota Gorontalo 2017.
- Huntington, Samoel P, *Clash of Civilisation and The Remaking of Word Order* London: Simon and Schuster Ltd, 1996.
- Murtiningsih, Siti, *Pendidikan Alat Perlawanan*, Yogyakarta: Resist Book, 2004.
- Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)*, Pelajaran Agama Islam kelas VI Semester II, tahun 2017.
- Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)*, Pelajaran Agama Kristen kelas VI Semester II, tahun 2017.
- Riyadi, Irfan dan Basuki, *Membangun Inklusivisme Paham Keagamaan*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Soekarno, *Pancasila Dasar Negara: Kursus Pancasila Oleh Presiden Soekarno*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekertaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, 2003.

